

## BAB VI

### KESIMPULAN

Jaringan advokasi transnasional Greenpeace, dalam usaha untuk mengubah kebijakan pemerintah yang didasari dari isu-isu ekologi yang ada seperti isu ekologi di Riau, menerapkan empat strategi yaitu politik informasi, politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas. Sementara isu-isu ekologi utama yang terjadi di Riau adalah kebakaran hutan, deforestasi yang diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit dan industri kertas dan pulp. Greenpeace pada politik informasinya membuat laporan-laporan temuan hasil investigasi atau riset mendalam di lapangan dan cerita kesaksian, sebagai bahan dari politik informasi dengan memanfaatkan adanya teknologi internet, media sosial, serta mitra media berita, sehingga informasi dapat sampai ke masyarakat di seluruh dunia. Laporan-laporan yang sudah dibuat oleh Greenpeace adalah *KFC Report*, *License to Kill*, dan cerita kesaksian dengan judul “Dulu Takut Asap, Kini Saya Cari Sumbernya”. Informasi-informasi tersebut kemudian menjadi cikal bakal dari pembentukan sebuah jaringan aksi yang terbentuk di dalam maupun di luar negeri.

Pada politik simbolik, Greenpeace menggunakan aksi-aksi kreatif yang seringkali ekstrim. Aksi-aksi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace ini menggunakan prinsip *non-violent direct action* dengan bertanggung jawab secara pribadi. Sementara, Greenpeace melakukan kampanyenya pada area yang simbolis atau menggunakan barang-barang yang mudah diingat oleh publik.

Kemudian, pada politik pengaruh, sesuai dengan konsep Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink, jaringan perlu membujuk dan menekan aktor yang lebih kuat untuk dapat membawa perubahan kebijakan. Oleh karena itu Greenpeace berusaha menekan aktor *Consumer Brand* karena memiliki pengaruh besar sebagai konsumen dari aktor target. Selain itu, Greenpeace juga menekan dan menegosiasikan dengan Bank HSBC untuk menghentikan pendanaan terhadap perusahaan-perusahaan minyak kelapa sawit yang melakukan perusakan hutan, serta untuk memperkuat kebijakan perlindungan hutan mereka. Hal tersebut kemudian berlanjut pada politik akuntabilitas, yang mana Greenpeace telah bersusah payah untuk mempengaruhi dan membuat aktor target mengubah kebijakan mereka. Dalam hal ini aktor target Greenpeace adalah perusahaan-perusahaan yang terlibat perusakan maupun pemerintah.

Dari politik informasi, politik simbolik, serta politik pengaruh yang telah dilakukan oleh Greenpeace atas isu-isu ekologi yang ada di Riau, Greenpeace telah berhasil membuat sejumlah aktor target berkomitmen untuk menghentikan perusakan, seperti komitmen perusahaan Golden Agri Resources, APP, APRIL, Bank HSBC, serta Wilmar. Dari komitmen-komitmen aktor target tersebutlah yang kemudian oleh Greenpeace dimanfaatkan untuk politik akuntabilitas. Menurut Margaret E. Keck & Kathryn Sikkink setelah target aktor secara terbuka sudah berkomitmen atas sebuah prinsip, maka jaringan dapat mengekspos jarak antara wacana dan praktik. Sementara komitmen ini berbentuk dokumen legal tertulis untuk memastikan bahwa aktor yang ditargetkan benar-benar mengubah kebijakannya. Meskipun dari politik akuntabilitasnya, Greenpeace menemukan

bahwa banyak dari komitmen aktor target tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, tetapi dari kasus-kasus deforestasi dan isu-isu ekologi yang ada di Riau, yang disebabkan oleh industri kelapa sawit dan pulp/HTI tersebut, serta aksi-aksi dalam politik simbolik, politik pengaruh, dan politik akuntabilitas Greenpeace, telah menciptakan sebuah komitmen dari pemerintah dengan dikeluarkannya Inpres nomor 8 Tahun 2018 tentang moratorium izin perkebunan sawit, HTI, dan pertambangan. Hal ini merupakan sebuah kemenangan bagi Greenpeace dalam upaya untuk mengubah kebijakan, dan untuk mendapatkan peluang politik akuntabilitas selanjutnya.